



TANTANGAN DIPLOMASI BUDAYA: ANALISIS KONFLIK IDENTITAS NETIZEN INDONESIA-MALAYSIA DI MEDIA SOSIAL

Nirzila Erdawati^{1*}, Naura Maharani², Putri Anggraini³

^{1,2,3} Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 2405050063@student.umrah.ac.id , 2405050040@student.umrah.ac.id ,
2405050055@student.umrah.ac.id

Abstract. *This study analyzes the challenges of Indonesia-Malaysia cultural diplomacy due to identity conflicts that have developed on social media. Although both countries share historical, cultural, and linguistic ties as kindred nations, their bilateral relations are often marked by tensions arising from cultural heritage disputes, migrant labor issues, and territorial conflicts. In the digital era, these conflicts have evolved into digital identity conflicts in the form of netwar and tauntwar between Indonesian and Malaysian netizens across various social media platforms. This study employs a qualitative approach with a case study method and qualitative content analysis techniques. Data were obtained through literature reviews sourced from scientific journals, international institution reports, policy documents, and relevant digital statistical data. The analysis was conducted using Joseph S. Nye's soft power theory as the main framework to understand the influence of digital identity conflicts on the effectiveness of cultural diplomacy. The findings reveal that digital identity conflicts pose a structural challenge to Indonesia-Malaysia cultural diplomacy, as negative narratives massively disseminated by non-state actors on social media are capable of eroding the positive image and public trust that serve as the primary foundation of soft power. These conflicts are reinforced by provocative media discourse construction, the spread of cyber-nationalism through digital networks, and low levels of public media literacy. This study concludes that the effectiveness of cultural diplomacy in the digital era requires a more adaptive public diplomacy strategy, the strengthening of cross-border digital literacy, and ASEAN involvement in managing digital identity conflicts to support regional socio-cultural integration.*

Keywords: *cultural diplomacy, digital identity conflict, social media, soft power, Indonesia-Malaysia, netizen.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis tantangan diplomasi budaya Indonesia-Malaysia akibat konflik identitas yang berkembang di media sosial. Meskipun kedua negara memiliki kedekatan historis, budaya, dan bahasa sebagai bangsa serumpun, hubungan keduanya kerap diwarnai ketegangan yang bersumber dari sengketa klaim budaya, isu tenaga kerja migran, dan sengketa wilayah. Di era digital, konflik tersebut berkembang menjadi konflik identitas digital dalam bentuk *netwar* dan *tauntwar* antara netizen Indonesia dan Malaysia melalui berbagai platform media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan teknik analisis isi kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan, dan data statistik digital yang relevan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori *soft power* Joseph S. Nye sebagai kerangka utama untuk memahami pengaruh konflik identitas digital terhadap efektivitas diplomasi budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik identitas digital menjadi tantangan struktural bagi diplomasi budaya Indonesia–Malaysia karena narasi negatif yang disebarkan secara masif oleh aktor non-negara di media sosial mampu mengikis citra positif dan kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama *soft power*. Konflik tersebut diperkuat oleh konstruksi wacana media yang provokatif, penyebaran *cyber-nationalism* melalui jaringan digital, serta rendahnya literasi media masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas diplomasi budaya di era digital memerlukan strategi diplomasi publik yang lebih adaptif, penguatan literasi digital lintas negara, serta keterlibatan ASEAN dalam mengelola konflik identitas digital demi mendukung integrasi sosial budaya kawasan.

Kata kunci: diplomasi budaya, konflik identitas digital, media sosial, *soft power*, Indonesia-Malaysia, netizen.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara serumpun yang tergabung dalam ASEAN dengan ikatan historis, budaya, dan bahasa yang erat. Meski demikian, hubungan keduanya kerap diwarnai ketegangan yang berakar dari sengketa klaim budaya, tenaga kerja migran, dan batas wilayah. Konflik tersebut tidak hanya berlangsung pada level negara, tetapi juga merambah ke masyarakat luas dalam bentuk sentimen nasionalisme yang intens. Survei terhadap 500 responden dari kedua negara menunjukkan bahwa 39,8% menilai klaim budaya sebagai sumber utama perselisihan, disusul isu tenaga kerja (18,2%) dan sengketa wilayah (14%) (Rozi, 2010).

Di era digital, ketegangan tersebut bertransformasi ke ruang media sosial dalam bentuk *netwar* dan *tauntwar*, yakni saling hujat antara netizen kedua negara melalui platform daring. Fenomena ini telah berlangsung sejak 2005 dan terus berlanjut hingga kini. Istilah-istilah provokatif seperti "Ganyang Malaysia", "Malingsia", dan "Indon" terus direpetisi lintas platform digital dalam bentuk *meme*, komentar, hingga *hashtag war* yang sulit dikendalikan (Ramadhoan, 2020). Berdasarkan analisis Twitter menggunakan Unionmetrics, tagar #GanyangMalaysia dalam rentang enam jam saja mampu menghasilkan potensi terpaan hingga 887.326 akun, mencerminkan betapa massif dan cepatnya penyebaran sentimen negatif antara kedua bangsa di ruang digital (Ramadhoan, 2020).

Eskalasi konflik digital ini semakin mengkhawatirkan seiring meningkatnya penetrasi media sosial di kedua negara. Per Januari 2025, Indonesia tercatat memiliki 212 juta pengguna internet dengan 143 juta pengguna aktif media sosial, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara (DataReportal, 2025). Sementara itu, berdasarkan data We Are Social (2023), Indonesia dan Malaysia sama-sama masuk dalam 10 negara dengan penggunaan media sosial tertinggi di dunia, dengan rata-rata waktu akses harian masing-masing 3 jam 28 menit dan 3 jam. Tingginya intensitas penggunaan media sosial ini menjadikan ruang digital sebagai arena konflik identitas yang subur dan sulit dikendalikan, di mana konten provokatif dapat menjangkau jutaan pengguna dalam hitungan jam.

Kondisi ini diperparah oleh konstruksi pemberitaan media massa yang cenderung provokatif. Media Indonesia kerap mereproduksi idiom "Ganyang Malaysia", sementara media Malaysia masih menggunakan kata "Indon" yang berkonotasi merendahkan, meskipun penggunaannya telah dilarang secara resmi oleh pemerintah Malaysia sejak 2007 (Ramadhoan, 2020). Wacana yang dibangun media kemudian diinternalisasi publik sebagai realitas objektif, mendorong netizen untuk menciptakan ejekan-ejekan baru yang kian variatif. Di sisi lain, rendahnya literasi media pengguna turut memperparah kondisi ini; kebanyakan netizen tidak memiliki kemampuan memadai untuk menyaring informasi sehingga mudah terprovokasi dan ikut menyebarkan konten yang belum terverifikasi (Elvionita & Sannusi, 2021).

Dinamika konflik digital ini berdampak langsung pada generasi muda yang tumbuh sebagai pengguna aktif media sosial. Generasi muda cenderung lebih terbuka terhadap perspektif global, namun sekaligus rentan terhadap polarisasi yang dipicu oleh narasi konflik budaya (Angel & Noviana, 2025). Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi diplomasi budaya sebagai instrumen *soft power* yang bertujuan membangun citra positif dan saling pengertian antarbangsa. Narasi negatif di media sosial berpotensi menghambat terwujudnya integrasi sosial budaya yang menjadi cita-cita ASEAN Community, khususnya dalam membangun rasa "ke-kita-an" (*we feeling*) antarbangsa (Ramadhoan, 2020). Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai bagaimana konflik identitas digital tersebut menantang efektivitas diplomasi budaya Indonesia-Malaysia menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan.

2. KAJIAN TEORITIS

Tinjauan pustaka ini menyajikan tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dipilih berdasarkan keterkaitan dari segi konsep (diplomasi budaya, *soft power*, dan konflik digital), objek/subjek (hubungan Indonesia-Malaysia dan netizen), serta teori (konstruktivisme dan digital nationalism).

1. Ramadhoan (2020)

Judul	Konstruksi Sosial Media Massa atas Hubungan Indonesia-Malaysia dan Pengaruhnya terhadap Netwar-Tauntwar
Jurnal / DOI	JISIERA: The Journal of Islamic Studies and International Relations, Vol. 5, hal. 51–86. https://doi.org/10.5281/zenodo.6790603

**TANTANGAN DIPLOMASI BUDAYA: ANALISIS KONFLIK IDENTITAS NETIZEN INDONESIA-
MALAYSIA DI MEDIA SOSIAL**

Tujuan	Menganalisis bagaimana konstruksi wacana media massa Indonesia dan Malaysia membentuk dan memperparah konflik netwar-tauntwar di ruang digital.
Metode	Kualitatif dengan analisis wacana kritis terhadap pemberitaan media massa dan konten media sosial kedua negara.
Hasil	Media massa di kedua negara mereproduksi narasi provokatif yang diinternalisasi publik dan memicu saling hujat masif di media sosial. Tagar #GanyangMalaysia mampu menjangkau 887.326 akun dalam enam jam.

Persamaan: Sama-sama mengkaji konflik identitas digital antara netizen Indonesia dan Malaysia sebagai objek utama, serta menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis konstruksi wacana dan narasi di ruang digital. Keduanya juga bertumpu pada teori konstruksi sosial sebagai landasan analisis.

Perbedaan: Ramadhon berfokus pada bagaimana konstruksi wacana media massa membentuk dan memperparah konflik netwar-tauntwar, tanpa menganalisis implikasinya terhadap diplomasi budaya. Penelitian ini berbeda karena secara khusus mengkaji dampak konflik identitas digital tersebut terhadap efektivitas diplomasi budaya Indonesia-Malaysia melalui kerangka teori soft power Nye.

2. Sari et al. (2021)

Judul	Quantitative Study of the Cyber-Nationalism Spreading on Twitter with Hashtag Indonesia and Malaysia using Social Network Analysis
Jurnal / DOI	Media Watch, 12(1), 161–171. https://doi.org/10.15655/mw_2021_v12i1_205465
Tujuan	Mengukur dan memetakan pola penyebaran cyber-nationalism antara netizen Indonesia dan Malaysia di Twitter.
Metode	Kuantitatif dengan Social Network Analysis (SNA).
Hasil	Cyber-nationalism menyebar secara struktural mengikuti pola jaringan tertentu yang melibatkan akun berpengaruh tinggi sebagai simpul utama penyebaran konten konflik.

Persamaan: Sama-sama menjadikan netizen Indonesia dan Malaysia sebagai objek penelitian, serta mengkaji fenomena cyber-nationalism dan konflik identitas digital di platform media sosial. Keduanya pun menggunakan teori digital nationalism sebagai landasan konseptual.

Perbedaan: Sari et al. menggunakan metode kuantitatif Social Network Analysis untuk memetakan pola penyebaran pesan cyber-nationalism, tanpa mengkaji dampaknya terhadap diplomasi budaya. Penelitian ini berbeda karena menggunakan pendekatan

kualitatif studi kasus dan berfokus pada implikasi konflik identitas digital terhadap efektivitas diplomasi budaya, dimensi yang tidak tercakup oleh analisis jaringan kuantitatif Sari et al.

3. Intentilia (2023)

Judul	Foreign Policy, Public Diplomacy, and Social Media: Observing Indonesian Missions Practices
Jurnal / DOI	Nation State: Journal of International Studies, 6(1), 1–17. https://doi.org/10.24076/nsjis.v6i1.1062
Tujuan	Menganalisis praktik diplomasi publik digital misi-misi diplomatik Indonesia melalui Instagram sebagai instrumen soft power.
Metode	Kualitatif dengan analisis konten akun Instagram KBRI/KJRI di berbagai negara.
Hasil	Media sosial efektif sebagai perpanjangan diplomasi resmi Indonesia, namun efektivitasnya bergantung pada konsistensi narasi dan jangkauan audiens.

Persamaan: Sama-sama mengkaji peran media sosial dalam konteks diplomasi dan hubungan luar negeri Indonesia, serta menggunakan konsep soft power Nye sebagai kerangka teoretis utama. Keduanya juga menggunakan metode kualitatif dan mengangkat isu diplomasi digital sebagai tema sentral.

Perbedaan: Intentilia mengkaji sisi optimistis media sosial sebagai instrumen diplomasi publik digital yang efektif bagi misi-misi diplomatik Indonesia, tanpa menyentuh dinamika konflik identitas. Penelitian ini berbeda karena mengkaji sisi sebaliknya, yaitu media sosial sebagai arena konflik identitas yang justru melemahkan efektivitas diplomasi budaya Indonesia-Malaysia, sehingga keduanya saling melengkapi satu sama lain.

Matriks Perbandingan

Aspek	Ramadhoan (2020)	Sari et al. (2021)	Intentilia (2023)	Penelitian Ini
Konsep	Netwar, konstruksi media	Cyber-nationalism, SNA	Diplomasi publik digital	Diplomasi budaya, konflik identitas digital
Objek	Media & netizen ID-MY	Netizen ID-MY di Twitter	Misi diplomatik Indonesia	Netizen ID-MY & efektivitas diplomasi budaya
Teori	Konstruksi sosial	Digital nationalism	Soft power Nye	Soft power Nye + konstruktivisme

Metode	Kualitatif wacana	–	Kuantitatif SNA	–	Kualitatif – konten	Kualitatif – studi kasus
--------	-------------------	---	-----------------	---	---------------------	--------------------------

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori soft power yang dikemukakan oleh Joseph S. Nye Jr. sebagai kerangka analisis utama. Nye (2004) mendefinisikan soft power sebagai kemampuan suatu aktor untuk mendapatkan apa yang diinginkan melalui daya tarik (attraction) dan bujukan (persuasion), bukan melalui paksaan atau imbalan materi. Soft power suatu negara bersumber dari tiga pilar utama, yaitu kebudayaan, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri yang dianggap sah dan bermartabat oleh negara lain.

Dalam konteks hubungan Indonesia-Malaysia, diplomasi budaya merupakan salah satu instrumen utama proyeksi soft power. Ulyana dan Salleh (2018) menunjukkan bahwa program-program pertukaran budaya antara kedua negara di bidang pendidikan, seni pertunjukan, dan sastra secara historis berhasil meredam ketegangan dan membangun saling pengertian antarbangsa. Namun, efektivitas soft power ini sangat bergantung pada persepsi publik, dan di sinilah konflik identitas digital menjadi variabel pengganggu yang krusial.

Nye (2008) secara khusus menekankan bahwa di era komunikasi modern, soft power tidak lagi bisa dikendalikan sepenuhnya oleh aktor negara. Aktor non-negara termasuk netizen, media, dan komunitas daring turut berperan dalam membentuk atau bahkan merusak citra suatu bangsa. Konflik identitas di media sosial antara netizen Indonesia dan Malaysia menjadi contoh konkret dari dinamika ini: narasi negatif yang disebarkan secara masif oleh aktor non-negara berpotensi menghapus capaian diplomasi budaya yang dibangun selama bertahun-tahun oleh aktor resmi.

Teori soft power Nye juga menegaskan bahwa kredibilitas adalah aset utama dalam diplomasi modern. Ketika konflik identitas digital menciptakan citra negatif satu sama lain, kredibilitas kedua negara sebagai mitra budaya yang saling menghormati menjadi terkikis, baik di mata publik domestik maupun internasional. Oleh karena itu, teori soft power relevan tidak hanya sebagai alat untuk menganalisis efektivitas diplomasi budaya, tetapi juga untuk mengidentifikasi titik-titik kerentanannya di era digital.

Definisi Konsep

1. Diplomasi Budaya

Diplomasi budaya adalah upaya aktor negara maupun non-negara untuk memproyeksikan nilai-nilai, tradisi, dan warisan budaya kepada publik asing sebagai instrumen untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan hubungan yang harmonis antarbangsa (Grincheva, 2024). Dalam konteks Indonesia-Malaysia, diplomasi budaya mencakup program pertukaran seni, pendidikan, dan promosi warisan budaya bersama yang bertujuan meredakan ketegangan akibat sengketa klaim budaya.

2. Konflik Identitas Digital

Konflik identitas digital merujuk pada pertentangan antara kelompok-kelompok yang memiliki identitas nasional, etnis, atau budaya berbeda yang termanifestasi melalui platform media sosial dalam bentuk ekspresi permusuhan, provokasi, dan kampanye negatif (Ramadhoan, 2020). Dalam penelitian ini, konflik identitas digital secara spesifik mengacu pada fenomena netwar dan tauntwar antara netizen Indonesia dan Malaysia yang berlangsung di berbagai platform daring.

3. Soft Power

Soft power didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi preferensi dan perilaku negara atau aktor lain melalui daya tarik — bukan paksaan — yang bersumber dari kebudayaan, nilai-nilai, dan kebijakan luar negeri (Nye, 2004). Dalam penelitian ini, soft power dioperasionalisasikan sebagai ukuran efektivitas diplomasi budaya Indonesia-Malaysia, yakni sejauh mana upaya diplomatik kedua negara berhasil membangun citra positif dan saling pengertian di tengah tekanan konflik identitas digital.

4. Netizen

Netizen (gabungan dari net dan citizen) adalah individu yang secara aktif berpartisipasi dalam komunitas daring dan menggunakan internet sebagai ruang ekspresi, interaksi sosial, dan pembentukan opini publik (Sari et al., 2021). Dalam konteks

penelitian ini, netizen Indonesia dan Malaysia merupakan aktor non-negara yang berperan signifikan dalam membentuk narasi konflik maupun harmoni di ruang digital bilateral.

5. Media Sosial

Media sosial adalah platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan, berbagi, dan berinteraksi melalui konten dalam jaringan sosial digital (DataReportal, 2025). Dalam penelitian ini, media sosial khususnya Twitter/X, TikTok, dan Instagram berfungsi sebagai arena utama di mana konflik identitas antara netizen Indonesia dan Malaysia berlangsung dan berkembang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*). Studi kasus dipilih karena memungkinkan analisis yang mendalam dan kontekstual terhadap fenomena konflik identitas digital Indonesia-Malaysia sebagai kasus tunggal yang kompleks dan kontemporer (Yin, 2018). Fokus analisis diarahkan pada dua level: pertama, dinamika konflik identitas di media sosial sebagai variabel independen; dan kedua, efektivitas diplomasi budaya Indonesia-Malaysia sebagai variabel dependen.

Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan, dan data statistik digital yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) untuk mengidentifikasi pola-pola narasi konflik dan implikasinya terhadap diplomasi budaya kedua negara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Konflik Identitas Digital Indonesia-Malaysia

Konflik identitas digital antara netizen Indonesia dan Malaysia merupakan fenomena yang telah berlangsung lebih dari dua dekade, namun intensitasnya semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan pesat penetrasi media sosial di kedua negara. Akar dari konflik ini terletak pada persengketaan klaim warisan budaya bersama termasuk batik, tari pendet, lagu Rasa Sayange, reog Ponorogo, hingga kuliner seperti rendang yang secara historis dimiliki oleh kedua masyarakat serumpun namun diklaim

secara eksklusif oleh salah satu pihak (Ulyana & Salleh, 2018). Perdebatan soal asal-usul rendang misalnya kembali viral di TikTok pada 2026 melalui konten kreator @adhityapeo yang menampilkan reaksi warganet Malaysia ketika diberi pertanyaan mengenai asal rendang; kolom komentar dipenuhi argumen pro dan kontra antara netizen yang meyakini rendang sebagai warisan Minangkabau (Indonesia) dan yang mengklaimnya sebagai bagian dari kuliner Melayu (Malaysia), mencerminkan bagaimana isu klaim budaya kuliner terus direproduksi lintas platform digital generasi baru.

Di ruang digital, persengketaan ini berevolusi menjadi netwar istilah yang merujuk pada konflik berbasis jaringan di mana aktor non-negara terlibat dalam pertempuran narasi melalui media digital (Ramadhoan, 2020). Penelitian Sari et al. (2021) menggunakan Social Network Analysis mengkonfirmasi bahwa pesan-pesan cyber-nationalism menyebar secara struktural, mengikuti jaringan yang diperkuat oleh akun-akun berpengaruh sebagai simpul utama. Hal ini menunjukkan bahwa konflik identitas digital memiliki dimensi organisasional yang melampaui sekadar ekspresi spontan individu.

Selain isu klaim warisan budaya formal, konflik identitas digital antara netizen Indonesia dan Malaysia juga merambah ke ranah budaya populer, khususnya komunitas penggemar (fandom) musik Korea Selatan (K-Pop). Penelitian netnografi terbaru menunjukkan bahwa fandom K-Pop di Indonesia, termasuk ARMY (sebutan penggemar BTS), telah berkembang menjadi agen partisipatif yang turut membentuk narasi nasionalisme digital, tidak terbatas pada urusan hiburan semata. Gesekan-gesekan kecil antar-fandom lintas negara serumpun, misalnya perdebatan soal intensitas dukungan, klaim kontribusi terhadap kesuksesan idola, atau persaingan dalam perebutan tiket konser menunjukkan bahwa pola netwar dan tauntwar yang sudah mengakar pada isu klaim budaya turut terinternalisasi ke ranah budaya populer kontemporer.

Menariknya, dinamika identitas digital di ranah fandom K-Pop tidak selalu berpola konfliktual antara Indonesia dan Malaysia. Kasus perseteruan “SEAblings” versus “K-Netz” yang mencuat pada awal 2026 dipicu oleh insiden pelanggaran aturan pada konser DAY6 di Kuala Lumpur yang berkembang menjadi komentar bernuansa rasial dari sebagian netizen Korea Selatan terhadap masyarakat Asia Tenggara—justru memperlihatkan fenomena sebaliknya: netizen Indonesia dan Malaysia, bersama netizen

Filipina, Thailand, dan Vietnam, bersatu sebagai “SEAbblings” untuk merespons narasi yang dianggap merendahkan identitas kolektif kawasan. Fenomena ini menegaskan bahwa identitas digital bersifat cair (fluid): ia dapat terfragmentasi menjadi konflik bilateral Indonesia–Malaysia pada satu konteks, namun terkonsolidasi menjadi solidaritas regional pada konteks lain ketika berhadapan dengan pihak ketiga yang dianggap mengancam identitas bersama. Hal ini memperkuat argumen Nye (2008) bahwa aktor non-negara di ruang digital memiliki agensi yang dinamis dan tidak dapat diprediksi sepenuhnya oleh kerangka diplomasi resmi, sehingga arena budaya populer turut menjadi titik kerentanan maupun potensi baru bagi proyeksi soft power kedua negara.

Bentuk gesekan lain yang muncul di ranah fandom K-Pop adalah persaingan akses tiket konser lintas negara, sebagaimana terlihat dalam kolom komentar konten TikTok bertema tutorial pembelian tiket konser BTS World Tour “ARIRANG” pada pertengahan 2026. Sejumlah netizen ARMY Malaysia menyuarakan kekecewaan karena banyak penggemar lokal tidak memperoleh tiket konser di negaranya sendiri, sembari mempertanyakan mengapa penggemar dari negara lain turut memburu tiket konser di Kuala Lumpur. Pembuat konten dan beberapa netizen lain menjelaskan bahwa fenomena ini didorong oleh disparitas harga tiket dan biaya perjalanan antarnegara, tiket maupun akomodasi di Malaysia dinilai lebih terjangkau dibandingkan di Jakarta, sehingga sebagian ARMY Indonesia memilih membeli tiket konser di Malaysia. Kondisi ini memunculkan persepsi ketidakadilan di kalangan sebagian ARMY Malaysia yang merasa harus berkompetisi dengan penggemar dari negara lain untuk mendapatkan tiket di negaranya sendiri, diperparah oleh maraknya praktik jasa war tiket (jaswar) dan penjualan tiket VIP secara tidak resmi oleh oknum tertentu. Kasus ini memperlihatkan bahwa ketegangan identitas digital antara netizen Indonesia dan Malaysia tidak selalu berakar pada isu klaim budaya atau nasionalisme semata, melainkan juga dapat dipicu oleh persoalan ekonomi-praktis seperti perebutan sumber daya terbatas (dalam hal ini, kursi konser) yang kemudian dibingkai dalam narasi kewargaan dan keadilan lintas negara.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi media di kalangan pengguna. Elvionita dan Sannusi (2021) menemukan bahwa mayoritas netizen di kedua negara tidak memiliki kemampuan memadai untuk menyaring informasi, sehingga mudah terprovokasi dan menyebarkan konten yang belum terverifikasi. Dalam konteks ini,

konflik identitas digital bukan hanya bersifat reaktif, melainkan juga ditopang oleh konstruksi wacana media massa yang secara sistematis mempertegas dikotomi "kita" versus "mereka" antara kedua bangsa.

Dampak terhadap Efektivitas Diplomasi Budaya

Dari perspektif soft power Nye (2004), efektivitas diplomasi budaya bergantung pada kemampuan suatu negara untuk memproyeksikan citra yang menarik dan terpercaya kepada publik asing. Konflik identitas digital secara langsung mengancam dua fondasi utama ini. Pertama, narasi negatif yang masif di media sosial yang menjangkau jutaan pengguna dalam waktu singkat menciptakan persepsi publik yang berlawanan dengan citra harmonis yang ingin dibangun melalui program-program diplomatik resmi. Kedua, polarisasi yang dipicu oleh konflik digital mengikis kepercayaan interpersonal antara warga kedua negara, yang merupakan modal sosial utama bagi keberhasilan diplomasi budaya jangka panjang.

Penelitian Intenilia (2023) menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya memanfaatkan media sosial sebagai instrumen diplomasi publik digital, termasuk untuk memproyeksikan soft power budaya. Namun, upaya ini menghadapi tantangan struktural: ruang digital yang sama secara bersamaan juga menjadi arena di mana konflik identitas terus diproduksi dan direproduksi oleh aktor non-negara yang jauh lebih banyak jumlahnya dan lebih cepat dalam menghasilkan konten. Ketidakseimbangan antara volume narasi konflik yang dihasilkan netizen dengan narasi positif yang dihasilkan oleh aktor diplomatik resmi menjadi salah satu hambatan struktural utama bagi efektivitas diplomasi budaya digital.

Ulyana dan Salleh (2018) mencatat bahwa program diplomasi budaya resmi antara Indonesia dan Malaysia seperti pertukaran pelajar, festival budaya bersama, dan kolaborasi seni secara historis terbukti efektif dalam meredakan ketegangan bilateral. Namun, efektivitas program-program tersebut semakin sulit dipertahankan ketika sentimen negatif di media sosial terus direproduksi oleh jutaan aktor non-negara secara real-time. Di sinilah terletak paradoks utama diplomasi budaya di era digital: instrumen yang paling powerful untuk membangun hubungan antarbangsa (media sosial) sekaligus menjadi ancaman terbesar bagi keberhasilannya.

Peran ASEAN dan Prospek ke Depan

Konflik identitas digital Indonesia-Malaysia tidak hanya relevan pada level bilateral, tetapi juga memiliki implikasi terhadap cita-cita integrasi regional ASEAN. ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025 (ASEAN, 2015) secara eksplisit menekankan pentingnya membangun rasa identitas ASEAN yang kohesif dan rasa ke-kita-an (*we feeling*) sebagai fondasi komunitas regional. Gelombang konflik identitas digital yang berulang antara dua negara anggota ASEAN terbesar justru berpotensi menghambat pembentukan identitas regional yang inklusif ini.

Ke depan, efektivitas diplomasi budaya Indonesia-Malaysia di era digital membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan multiaktor. Di sisi pemerintah, diperlukan strategi diplomasi publik digital yang lebih proaktif dan responsif terhadap dinamika narasi di media sosial. Di sisi masyarakat sipil, peningkatan literasi media dan literasi digital menjadi prasyarat untuk memutus siklus produksi dan reproduksi narasi konflik. Di level regional, mekanisme ASEAN perlu diperkuat untuk mengakomodasi dimensi konflik digital dalam kerangka diplomasi budaya kawasan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik identitas digital antara netizen Indonesia dan Malaysia merupakan tantangan struktural yang serius bagi efektivitas diplomasi budaya kedua negara. Melalui kerangka teori *soft power* Nye, analisis menunjukkan bahwa narasi konflik yang disebarkan secara masif oleh aktor non-negara di media sosial secara sistematis menggerus dua fondasi utama *soft power*: citra yang menarik dan kepercayaan publik. Paradoks utama yang ditemukan adalah bahwa media sosial instrumen yang paling potensial untuk memajukan diplomasi budaya digital secara bersamaan juga menjadi arena yang paling subur bagi konflik identitas yang melemahkannya.

Konflik ini tidak bersifat spontan, melainkan ditopang oleh tiga faktor yang saling memperkuat: konstruksi wacana media massa yang provokatif, pola penyebaran *cyber-nationalism* yang terstruktur melalui jaringan akun berpengaruh, serta rendahnya literasi media di kalangan pengguna kedua negara. Upaya diplomasi budaya resmi yang dilakukan oleh kedua pemerintah, meski terbukti efektif secara historis, menghadapi

tantangan skala yang tidak seimbang di era digital di mana jutaan konten konflik diproduksi setiap harinya oleh aktor non-negara yang tidak terikat oleh norma diplomatik apapun.

Implikasi teoretis dari penelitian ini menegaskan perlunya perluasan konsep soft power Nye untuk mengakomodasi peran aktor non-negara digital secara lebih sistematis. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan tiga hal: pertama, penguatan strategi diplomasi publik digital yang responsif terhadap narasi media sosial; kedua, investasi dalam program literasi media lintas batas untuk generasi muda di kedua negara; dan ketiga, integrasi dimensi konflik digital dalam mekanisme diplomasi budaya ASEAN yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Adhityapneo. (2026). Reaksi warganet Malaysia mengenai asal usul rendang [Video TikTok]. TikTok.
- Angel, J., & Noviana, E. (2025). Peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran konflik klaim budaya Indonesia-Malaysia di kalangan generasi muda. *Prosiding Seminar Nasional Desain Komunikasi Visual*, 77–92. ISSN 2808-3741.
- Canzails. (2026). Tutorial lengkap war tiket konser BTS World Tour Arirang di Malaysia [Video TikTok]. TikTok.
- ASEAN. (2015). ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025. ASEAN Secretariat. <https://asean.org/our-communities/asean-socio-cultural-community/>
- DataReportal. (2025). Digital 2025: Indonesia. Kepios Analysis. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>
- Elvionita, T., & Sannusi, S. N. (2021). Kajian literasi media dalam kalangan pelajar terhadap isu kontroversi Malaysia dan Indonesia di media sosial. *Jurnal Wacana Sarjana*, 5(5), 1–17. e-ISSN 2600-9501.
- Grincheva, N. (2024). The past and future of cultural diplomacy. *International Journal of Cultural Policy*, 30(2), 172–191. <https://doi.org/10.1080/10286632.2023.2183949>
- Intentilia, A.A.M. (2023). Foreign policy, public diplomacy, and social media: Observing Indonesian missions practices. *Nation State: Journal of International Studies*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.24076/nsjis.v6i1.1062>
- Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi. (2026). Aktivitas nasionalisme digital: Studi netnografi fandom K-Pop di Indonesia.
- The Jakarta Post. (2026, Februari 21). SEAbings unite online against racist attacks from Knetz. The Jakarta Post.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. Public Affairs.

- Nye, J. S. (2008). Public diplomacy and soft power. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 94–109. <https://doi.org/10.1177/0002716207311699>
- Ramadhoan, R. I. (2020). Konstruksi sosial media massa atas hubungan Indonesia-Malaysia dan pengaruhnya terhadap netwar-tauntwar. *JISIERA: The Journal of Islamic Studies and International Relations*, 5, 51–86. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6790603>
- Rozi, S. (2010). Cyber clash di dunia maya: Cyberwar dan conflict resolution Indonesia-Malaysia. *Jurnal Kajian Wilayah*, 1(2), 253–276. ISSN 2087-2119.
- Sari, D. K., Ahmad, J., Hergianasari, P., Harnita, P. C., & Wibowo, N. A. (2021). Quantitative study of the cyber-nationalism spreading on Twitter with hashtag Indonesia and Malaysia using social network analysis. *Media Watch*, 12(1), 161–171. https://doi.org/10.15655/mw_2021_v12i1_205465
- Sari, D. K., Kumorotomo, W., & Kurnia, N. (2022). Delivery structure of nationalism message on Twitter in the context of Indonesian netizens. *Social Network Analysis and Mining*, 12(1), 173. <https://doi.org/10.1007/s13278-022-01006-3>
- Schneider, F. (2022). Emergent nationalism in China's sociotechnical networks: How technological affordance and complexity amplify digital nationalism. *Nations and Nationalism*, 28(1), 267–285. <https://doi.org/10.1111/NANA.12779>
- Ulyana, Y. A., & Salleh, M. A. (2018). The role of cultural diplomacy: Indonesia–Malaysia relations. *Asian People Journal (APJ)*, 1(2), 197–206. <https://journal.unisza.edu.my/apj/index.php/apj/article/download/43/38>
- We Are Social. (2023). *Digital 2023: Global overview report*. <https://wearesocial.com/global-digital-report/>
- Wendt, A. (1999). *Social theory of international politics*. Cambridge University Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.